

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
PENGADAAN TANAH (SIGPeta)
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

LIA NOVITA SARI
NIT. 17263064 / PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	10
1. Pengadaan Tanah	10
2. Basis Data Pertanahan dalam Pengadaan Tanah.....	13
3. Sistem Informasi Pengadaan Tanah	17
C. Kerangka Pikir Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian.....	22

B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	23
D. Teknis Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Kantor Pertanahan Kota Bengkulu	28
B. Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah.....	29
BAB V PENERAPAN APLIKASI SIPT DAN SIGPeta DALAM	
KEGIATAN PENGADAAN TANAH.....	32
A. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu	32
1. Fitur dan fungsi aplikasi SIPT.....	35
B. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pengadaan Tanah (SIGPeta) di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu	47
1. Fitur dan Fungsi Aplikasi SIGPeta	49
2. Penerapan Aplikasi SIGPeta Sebagai Admin	52
C. Perbandingan Fitur dan Fungsi Utama Aplikasi SIPT dan SIGPeta Berdasarkan Pengalaman Pengguna	63
1. Perbandingan Fitur dan Fungsi Utama Aplikasi	63
2. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi	71
D. Hambatan dan Solusi dalam Pemanfaatan Aplikasi SIPT dan SIGPeta Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah	75
1. Hambatan dalam Pemanfaatan Aplikasi SIPT dan SIGPeta	75
2. Solusi dalam menghadapi hambatan pada pemanfaatan aplikasi SIPT dan SIGPeta	78
BAB VI PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia global sekarang ini sudah menuju era digital, dimana sebagian besar pelayanan, penyimpanan, dan pekerjaan sudah dilaksanakan dalam bentuk digital. Tanpa perlu menyentuh data-data fisik yang rentan akan kerusakan, kita dapat memperoleh, mempublikasi dan membagikan informasi secara cepat dan tepat. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, Layanan elektronik telah mengubah pemahaman masyarakat tentang layanan pertanahan, dan sejalan dengan visi dan misi ATR/BPN 2019-2024 untuk bergerak menuju industri berstandar dunia. Kantor Pertanahan menyediakan produk tata ruang dan layanan pertanahan elektronik sebagai perwujudan dari kantor pertanahan yang modern.(Gatra, 2019).

Kementerian ATR/BPN melalui program Presiden Joko Widodo yaitu DILAN/ digital melayani, semakin meningkatkan pelayanan dan perubahan ke arah digital. Sofyan Djalil mengatakan, Kementerian ATR/BPN saat ini menjalankan empat jenis layanan elektronik, yakni pengecekan sertipikat tanah, hak tanggungan, roya, dan informasi zona nilai tanah. Sofyan Djalil mengklaim beroperasinya keempat layanan berbasis digital ini mampu mengurangi jumlah antrian di Kantor Pertanahan hingga 40% (Republika, 2020).

Layanan berbasis digital di Kantor Pertanahan membutuhkan sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan data lapangan, mendeskripsikan hasil survei, hingga pengelolaan data lapangan. Selain itu, SIG juga dapat dimanfaatkan dalam perubahan data pertanahan, verifikasi dan pengendalian kualitas data pertanahan, juga dalam visualisasi data pertanahan baik dalam 2 dimensi (2D) maupun 3 dimensi (3D) (ATRBP, 2020).

Sistem informasi geografis tidak hanya dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan dan Kementerian/ Lembaga yang berhubungan dengan bidang tanah atau *based on parcel* saja. Menurut Eddy Prahasta (2001), banyak sektor yang telah memanfaatkan sistem informasi geografis contohnya di bidang pariwisata, pendidikan, sumber daya alam, telekomunikasi, transportasi, serta militer (Aisiyah & Wulansari, 2019).

Sistem informasi geografis juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi timbulnya masalah-masalah pada pertanahan. Salah satunya adalah keterbukaan informasi pertanahan. Kantor pertanahan sebagai instansi pelayanan publik seharusnya sudah tidak asing lagi dengan keterbukaan informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008, bentuk keterbukaan informasi publik adalah pemerintah selaku penyelenggara prosedur dan pelayanan publik berkewajiban untuk membuka pelayanan informasi kepada publik.

Salah satu contoh permasalahan keterbukaan informasi di Kantor Pertanahan adalah pada kegiatan pengadaan tanah. Informasi yang kurang terbuka dan transparan membuat muncul prasangka buruk dalam masyarakat terdampak pengadaan tanah (Sutaryono, 2018). Dalam Penelitian Dewi, dkk (2020) juga menemukan permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum akibat kurang terbukanya informasi.

Jika informasi tentang adanya kegiatan pengadaan tanah dapat dipublikasikan melalui media online, maka subjek pengadaan tanah/ masyarakat terdampak dapat mengetahui informasi terbaru tentang kegiatan ini. Sehingga sistem informasi geografis pengadaan tanah dirasa perlu untuk diterapkan pada kantor pertanahan yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan tanah.

Selain sebagai wadah keterbukaan informasi, sistem informasi pengadaan tanah juga perlu diterapkan sebagai ruang penyimpanan digital arsip kegiatan pengadaan tanah. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang banyak, mengakibatkan jumlah arsip yang harus disimpan oleh kantor pertanahan juga bertambah banyak. Sehingga kantor

pertanahan memerlukan penambahan ruang penyimpanan arsip dengan keamanan dan manajemen yang baik agar arsip kegiatan pengadaan tanah tidak rusak dan hilang. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yang masih manual akan mengakibatkan kesulitan dalam melihat dan mengumpulkan informasi pelaksanaan kegiatan secara cepat. Penerapan sistem informasi akan memudahkan kantor pertanahan dalam pengelolaan arsip, pelaporan progress pekerjaan serta mempermudah pimpinan dalam melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Pada tahun 2020, di kantor pertanahan Kota Bengkulu telah berjalan kegiatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol lintas Sumatera jalur Kota Bengkulu-Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Jalan tol ini akan menghubungkan Kota Bengkulu dan Kota Lubuklinggau dengan panjang tol 95,8 km. Pengerjaan tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2022. Pembangunan jalan tol ini tidak hanya berada di Kota Bengkulu tetapi juga Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Empat Kota dan Kabupaten ini merupakan jalan lintas menuju Sumatera Selatan (Kompas, 2020).

Kantor pertanahan kota Bengkulu terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah mulai tahap pelaksanaan pengadaan tanah hingga tahap penyerahan hasil. Pengadministrasian dokumen-dokumen kegiatan pengadaan tanah sebelumnya masih menggunakan sistem manual. Hal ini dapat menjadi sebuah masalah jika kantor pertanahan tidak melakukan administrasi dokumen secara baik. Permasalahan ini akan berdampak pada jangka waktu penyelesaian kegiatan pengadaan tanah yang menjadi lama. Salah satu kendala pengadaan tanah dikarenakan tidak lengkapnya dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dipegang oleh pemerintah yang dijadikan dasar dalam melakukan pembebasan tanah seperti surat keputusan, berita acara dan dokumen lainnya tidak terkumpul pada satu tempat melainkan tersebar di beberapa kantor/instansi yang berbeda, sehingga jika ingin melakukan pencarian data akan mengalami kesulitan. (Simanjuntak, 2012).

Untuk menghindari permasalahan tersebut, kantor pertanahan kota Bengkulu menggunakan sistem informasi yang telah di *launching* oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2016 yaitu Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) dalam menunjang percepatan pelaksanaan pengadaan tanah dan penyimpanan dokumen dan arsip kegiatan pengadaan tanah secara digital. SIPT memiliki kemampuan dan fungsi sebagai media monitoring dalam pelaksanaan pengadaan tanah, baik oleh Kantor Kementerian ATR/BPN, Kantor wilayah provinsi Bengkulu, maupun kantor pertanahan kota Bengkulu. Data yang disajikan pada aplikasi SIPT saling terintegrasi dan sesuai dengan kewenangan masing-masing kantor. Penggunaan aplikasi SIPT diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka percepatan dan penyelesaian masalah manajemen arsip dokumen pengadaan tanah.

SIPT sebagai sistem informasi akan memberikan kemudahan kepada pegawai kantor pertanahan untuk menyimpan basis data dan mengumpulkan data. Namun, aplikasi SIPT hanya dapat diakses oleh pegawai kantor pertanahan saja. Hal ini dikarenakan untuk dapat mengakses informasi pada aplikasi SIPT, pengguna wajib login menggunakan akun aplikasi atau akun KKP web. Masyarakat sebagai subjek kegiatan pengadaan tanah memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pengadaan tanah namun karena keterbatasan akses dalam aplikasi SIPT sehingga hal ini tidak dapat terpenuhi. Sehingga diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menyajikan informasi kegiatan pengadaan tanah kepada masyarakat umum. Berangkat dari hal tersebut, tim KKNP-PTLP kantor pertanahan kabupaten Kulon Progo membangun sistem informasi pengadaan tanah (SIGPeta). SIGPeta diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak mengetahui informasi-informasi terkait kegiatan pengadaan tanah.

Selain itu, yang menjadi latar belakang dalam pembangunan aplikasi SIGPeta adalah manajemen arsip pengadaan tanah di kantor pertanahan kurang baik dan masih manual, sehingga lama dalam melihat data informasi kegiatan pengadaan tanah, serta pengetahuan masyarakat masih sedikit tentang kegiatan pengadaan tanah. Aplikasi sistem informasi geografis pengadaan tanah

(SIGPeta) dirancang dalam sebuah website yang dapat diakses secara *online* oleh pengguna. Perancangan aplikasi SIGPeta dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suatu sistem informasi pengadaan tanah yang dapat diakses oleh masyarakat dan menerapkan keterbukaan informasi pada Kantor Pertanahan. Kemudahan akses informasi kegiatan pengadaan tanah merupakan tujuan utama dari dari aplikasi SIGPeta.

Pada saat uji coba di kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo, aplikasi ini mendapatkan respon yang cukup baik dari Kantor Pertanahan. Hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan uji coba penerapan sistem informasi geografis pengadaan tanah (SIGPeta) di kantor pertanahan Kota Bengkulu. Selain itu, penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan sistem informasi pengadaan tanah SIPT bagi kantor pertanahan Kota Bengkulu, perbandingan fitur yang dimiliki oleh aplikasi SIPT dan SIGPeta, kekurangan dan kelebihan, serta hambatan apa saja yang dialami dalam menerapkan aplikasi SIPT dan SIGPeta. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pengadaan Tanah (SIGPeta) Di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem informasi pengadaan tanah (SIPT) di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Geografis Pengadaan Tanah (SIGPeta) di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu?
3. Bagaimana perbandingan fitur dari aplikasi SIPT dan SIGPeta serta kelebihan dan kekurangannya untuk kegiatan pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu?
4. Apa hambatan dalam penerapan aplikasi SIPT dan SIGPeta di Kantor Pertanahan dan bagaimana solusinya?

C. Batasan Penelitian

1. Aplikasi SIPT merupakan aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN yang telah diimplementasikan pada kegiatan pengadaan tanah tahun 2020. Penerapan aplikasi SIPT dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
2. Penerapan aplikasi SIGPeta dalam penelitian ini terbatas pada uji coba di kantor pertanahan kota Bengkulu pasca kegiatan pengadaan tanah tahun 2020.
3. Fitur, kelebihan dan kekurangan aplikasi SIPT dan SIGPeta dalam penelitian ini dibatasi pada pengalaman pengguna di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu terhadap masing-masing aplikasi, karena SIPT dan SIGPeta memiliki fitur dan fungsi yang berbeda.
4. Hambatan dalam penerapan aplikasi SIPT terbatas pada penerapan aplikasi untuk kegiatan pengadaan tanah tahun 2020. Sedangkan hambatan penerapan aplikasi SIGPeta terbatas pada saat dilaksanakannya uji coba aplikasi di kantor pertanahan kota Bengkulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi pengadaan tanah (SIPT) pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
- b. Untuk mengetahui uji coba penerapan aplikasi SIGPeta dalam kegiatan pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi SIPT dan SIGPeta dalam kegiatan pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- d. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan aplikasi SIPT dan SIGPeta serta solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui peran aplikasi SIPT dalam kegiatan pengadaan tanah.

- b. Mengetahui peran aplikasi SIGPeta dalam kegiatan pengadaan tanah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN khususnya dan pemangku kebijakan pengadaan tanah umumnya agar dapat berkolaborasi mengembangkan sebuah sistem informasi pengadaan tanah terpadu untuk mendukung proses dan publikasi pasca pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) telah diterapkan pada tahun 2020 dalam rangka kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung. Menu tahapan pada SIPT sudah mengakomodir tahapan-tahapan pengadaan tanah dengan lengkap mulai dari entri SK Pelaksana hingga ke tahapan penyerahan hasil.

Sistem Informasi Geografis Pengadaan Tanah (SIGPeta) dilakukan uji coba penerapannya untuk kegiatan yang sama, dengan fungsi yang berbeda. SIGPeta berfokus pada menyajikan data hasil kegiatan tanah atau pasca pengadaan tanah kepada masyarakat umum. Data informasi yang ditampilkan adalah berupa peta bidang tanah hasil kegiatan pengadaan tanah beserta informasi-informasi umum yang boleh diakses secara umum dan bukan data yang bersifat rahasia.

Aplikasi SIPT dan SIGPeta memiliki fitur dan fungsi yang berbeda sehingga setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah aplikasi SIPT memerlukan akun pengguna untuk mengakses informasi pada aplikasi tersebut, sedangkan aplikasi SIGPeta bersifat *free to access* dan boleh diakses secara umum. SIPT memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan SIGPeta karena telah mencakup semua tahapan kegiatan pengadaan tanah terutama pada tahapan pelaksanaan di kantor pertanahan.

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pengguna dalam penerapan aplikasi SIPT dan SIGPeta. Salah satu hambatan yang dirasakan pada SIPT adalah terdapat fitur unduh data yang gagal karena file *corrupt* pada saat akan melakukan unduh data SK tim pengadaan tanah maupun SK Satgas. Solusi yang dilakukan oleh kantor pertanahan untuk mengatasinya adalah dengan mencari arsip file pada server penyimpanan lokal kantor pertanahan. Hambatan pada uji coba SIGPeta adalah data informasi yang disajikan oleh SIGPeta hanya terbatas pada informasi kegiatan pengadaan tanah yang telah dilaksanakan/ pasca pengadaan tanah.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penerapan aplikasi SIPT dan SIGPeta di Kantor Pertanahan ini adalah sosialisasi terkait suatu aplikasi sebaiknya diberikan kepada semua pegawai Kantor Pertanahan, bukan hanya kepada salah satu admin Kantor Pertanahan. Pelatihan secara bertahap juga perlu dilakukan kepada pegawai Kantor Pertanahan agar tidak ketinggalan informasi jika terdapat penambahan fitur-fitur terbaru dalam aplikasi.

Aplikasi SIPT dan SIGPeta dapat dikolaborasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. Aplikasi SIPT sebagai aplikasi internal yang hanya dapat diakses oleh pegawai Kantor Pertanahan sebagai penyimpan database pengadaan tanah dan aplikasi SIGPeta sebagai aplikasi yang akan menampilkan informasi kegiatan pengadaan tanah tersebut kepada masyarakat umum. Sehingga kedua aplikasi ini nantinya dapat bersinergi dan sama-sama bermanfaat bagi masing-masing target aplikasi. Beberapa update dan perbaikan juga perlu dilakukan oleh Pusdatin dan pengembang aplikasi SIGPeta agar kedua aplikasi ini dapat digunakan secara optimal oleh pengguna aplikasi. Terutama pada aplikasi SIGPeta untuk dapat menambahkan informasi umum tentang pengadaan tanah, seperti tahapan-tahapan kegiatan, hak dan kewajiban masyarakat terdampak, dan informasi lainnya pada tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, N. & Wulansari, H., 2019. *Modul sistem informasi geografis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aji, E.P., 2019. Pemanfaatan aplikasi Mapit GIS untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Cianjur. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Andriawan, D., 2020. Pemanfaatan aplikasi siap dalam pengumpulan data yuridis pada pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Ariwibowo, M.M., 2019. Perbandingan efektivitas pemanfaatan aplikasi Locus GIS dan Mapit GIS untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Cianjur. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Asyita, M., & Taufik, M., 2013. Sistem informasi pertanahan untuk evaluasi bidang tanah (studi kasus : perumahan bumi marina emas Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya). *Jurnal Teknik Pomits*, X(X), hal. 1–6.
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kecamatan selebar dalam angka 2020*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik.
- Darmawan, D., 2013. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewi, A.R., Sutaryono, & Nurhikmahwati, A., 2020. Pemetaan masalah pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat (kasus jalan tol Padang-Sicincin), *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), hal. 277-291
- Prakoso, G., 2017. *Penguatan sistem informasi pengadaan tanah terpadu untuk mendukung proyek strategis nasional*. Prosiding seminar: Problematika pertanahan dan strategi penyelesaiannya. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pusdatin, 2018. *Panduan aplikasi sistem informasi pengadaan tanah*. Pusat data dan informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- Satria, R.J., Arianto, T. & Nugroho, A., 2018. Pemanfaatan aplikasi informasi warkah (i-Wak) untuk sistem pengarsipan warkah (studi di kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Tunas Agraria*, 2(1), hal. 172-195.
- Simanjuntak, R.K., 2012. Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Tampapadang di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S., 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Sutaryono, 2018. *Penyiapan dokumen perencanaan pengadaan tanah*. Modul Pelatihan LARAP, World Bank, UGM, dan STPN, 17-21 Desember.
- Utami, W., Nurcahyanto, D., & Sudibyanung, 2021. Economic Impacts of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport Project. *Mimbar*, 37(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Website

- Ane, 2019. ATR/BPN luncurkan layanan pertanahan berbasis elektronik. *Gatra.com*. <https://www.gatra.com/detail/news/442376/teknologi/atrbpn-luncurkan-layanan-pertanahan-berbasis-elektronik>.

- Suhaiela, B., 2020. Proyek tol tuntas 2022, dari Lubuklinggau ke Bengkulu hanya 2 jam. *Kompas*. <https://www.kompas.com/properti/read/2020/12/10/120000421/proyek-tol-tuntas-2022-dari-lubuk-linggau-ke-bengkulu-hanya-2-jam>.
- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2020. Penanganan permasalahan tata ruang dan pertanahan dengan pemanfaatan GIS. *Website Kementerian ATR/BPN*, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=xOkcR6LGNVW6WGj19CCNlOxWC2qlPO1vfW2vjUITj17LHS9jTAA/qK86tduF8Nuk>.
- Republika, 2020. Layanan pertanahan ditargetkan serba digital pada 2024. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/qjj1cd428/layanan-pertanahan-ditargetkan-serba-digital-di-2024>.